

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Kemiskinan

###### a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat kompleks dan multidimensi sehingga dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini kebutuhan sandang, pangan, dan papan

Kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kekurangan modal menyebabkan pendapatan mereka rendah. Pendapatan rendah menghasilkan tabungan dan investasi yang rendah. Pendapatan rendah menyebabkan keterbelakangan, dll. Logika berpikir ini dikemukakan oleh ahli ekonomi pembangunan terkenal Ragnar Nurkse pada tahun 1953 yang mengatakan "*a poor country is poor because it is poor*" (negara miskin menjadi miskin karena miskin).

Kemiskinan adalah sekelompok orang atau individu yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan yang berada dalam situasi tidak mampu untuk mencukupi keperluan dasar seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dll dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan (Bappenas, 2004).

Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan, serta keterampilan, dan aspek sekunder yang miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad, 2009)

Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu: *pertama*, kemiskinan absolut, dimana pendekatan ini diidentifikasi dengan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu. *Kedua*, kemiskinan relatif, yaitu pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah Head Count Index (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (poverty line). Selain Head Count Index (P0) terdapat juga indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2). Head Count Index (P0) merupakan jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis

kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Demikian juga sebaliknya, bila angka P0 besar maka menunjukkan tingginya jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (Arfah, 2021)

b. Penduduk miskin

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbanyak ke-3 setelah China dan AS. (Jhinghan, 2002), Jumlah penduduk terlalu banyak atau kepadatan penduduk terlalu tinggi atas menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang. Pendapatan per kapita dan tingkat pembentukan modal yang rendah semakin sulit bagi negara berkembang untuk menopong ledakan jumlah penduduk. Sekalipun output meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditekan oleh jumlah penduduk yang terlalu banyak. Alhasil, tidak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan nyata dalam perekonomian.

Tahun 1798 Reverend Thomas Maltus mengemukakan teorinya tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul *Essay on the Principle of Population* ia melukiskan konsep hasil yang menurun (*concept of diminishing returns*). Malthus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu menjadi dua kali lipat setiap 30-40 tahun, sementara itu pada saat yang sama,

karena hasil yang menurun dan faktor produksi tanah persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung (Arsyad 2004). Karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan per kapita (dalam masyarakat yang didefinisikan sebagai produksi pangan per kapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk yang tidak pernah stabil atau hanya sedikit di atas tingkat subsistem.

Menurut (Dumairy, 1997), alasan penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita menimbulkan masalah ke tenagakerjaan.

Menurut teori Malthus (Todaro, 2006) pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis. Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur. Sementara itu, karena adanya proses pertumbuhan hasil yang semakin berkurang disutatu faktor produksi yang jumlah tetap yaitu tanah, maka persedian pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung.

Karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat berpacu secara memadai atau mengimbangi kecepatan perkapita (dalam

masyarakat agraris, pendapatan perkapita diartikan sebagai produksi pangan perkapita) cenderung mengalami penurunan sampai sedemikian rendahnya sehingga segenap populasi harus bertahan pada kondisi sedikit diatas tingkat subsistem.

Seseorang dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian tersebut (Siregar dan Wahyuniarti, 2008).

c. Penyebab Kemiskinan

Menurut Todaro (1995), menyebabkan bahwa kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1) perbedaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan, 2) perbedaan sejarah, sebagai dijajah oleh negara berlainan, 3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, 4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, 5) perbedaan struktur industri, 6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik dan kelembagaan dalam negara.

d. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran

kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayur, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Ket :

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan bukan makanan. BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan batas garis kemiskinan setara dengan 2.100 kalori perkapita per hari yang akan disetarakan dengan rupiah ketika pengukuran kemiskinan dilakukan di tiap daerah/provinsi dengan menyesuaikan harga yang berlaku pada suatu daerah provinsi tertentu. Sehingga pengukuran kemiskinan pada daerah/provinsi akan menggunakan satuan rupiah dengan menyesuaikan harga pada tiap-tiap daerah tertentu.(Adji et al., 2020).

e. Karakteristik Kemiskinan

Karakteristik kemiskinan yaitu:

- 1) Mereka yang hidup di bawah kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti: tanah yang cukup. Modal dan keterampilan yang tidak mencukupi. Sebagai akibat faktor produksi yang dimiliki sangat terbatas, maka kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- 2) Mereka pada umumnya tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha.
- 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah. Pendidikan ini sangat rendah karena waktu mereka lebih banyak tersita untuk mencari nafkah. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tak dapat menyelesaikan sekolahnya karena harus membantu orang tuanya untuk mencari tambahan pendapatan.
- 4) Banyak diantara mereka tidak mempunyai tanah. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja keras diluar pertanian. Oleh karena pekerja pertanian bersifat musiman, maka kesinambungan bekerja lebih kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas yang berusaha apa saja. Akibatnya, dalam situasi penawaran kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga membuat mereka selalu hidup di bawah kemiskinan.

## **2. Pengeluaran Pemerintah**

### **a. Definisi Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirni dalam Pratowo) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah/regional.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan utang pemerintah serta jumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, yang dibedakan atas pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.

Menurut (Kotler dan Armstrong, 2008) bahwa pengeluaran pemerintah dapat dibedakan sebagai berikut:



1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat
3. Merupakan penghambat pengeluaran yang akan datang
4. Menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Sedangkan macam-macam pengeluaran pemerintah, yaitu :

1. Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau sepenuhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapat pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa dan barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek produktif.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pendidikan dan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.
3. Pengeluaran yang tidak termasuk *self liquidating* dan reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambahkan kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monument dan sebagainya.

4. Pengeluaran yang merupakan penghambat dimasa akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat.

#### **b. Teori Pengeluaran Pemerintah**

##### 1) Teori Adolph Wagner

Teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap Gross National Product (Gnp). Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah ikut meningkat. Terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbal dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Winarti, 2014)

##### 2) Teori Rostow dan Musgrave

WW Rostow dan RA Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional – relatif besar. Hal itu disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas

##### 3) Teori Peacock Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengendalikan penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Peacock dan Wiseman menyatakan sebagai berikut: masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Winarti, 2014).

### **3. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

Sumber daya manusia bagi suatu negara merupakan salah satu faktor penentu bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara tersebut. Untuk itu, pendidikan formal merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat dan harus disediakan oleh negara. Tidak hanya pengetahuan, norma-norma, nilai luhur dan cita-cita yang dapat menyatu dan berkontribusi pada pembangunan

bangsa. Hingga awal 1990-an, anggaran pendidikan di banyak negara dunia ketiga menyumbang sekitar 15-27 persen dari total pengeluaran pemerintah, seperti halnya Indonesia.

Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20 % dari APBN untuk sektor pendidikan, sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 mengatur bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan menerima sekurang-sekurangnya 20% dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di khususkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kemajuan suatu negara dapat diukur dari tingkat pendidikan dan masyarakatnya.(Irawati & Susetyo, 2017).

#### **4. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan**

Kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia. Manusia tidak akan dapat beraktifitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Beberapa ekonomi menganggap bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi, baik jika dinilai dari stock maupun sebagai investasi. Sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh karena itu kesehatan dianggap sebagai model dan memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan

public yang disediakan oleh pemerintah. Tidak hanya bagi usia dewasa namun juga anak-anak. Sebagai negara berkembang yang sangat rentan akan masalah kesehatan, sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk mewujudkan salah satu dari hak asasi manusia, khususnya hak untuk mengakses pelayanan kesehatan berdasarkan UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Prioritas kesehatan harus dilihat sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melihat mutu manusia dari sisi lain yaitu dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi sumber daya manusia, kekurangan kalori, gizi, atau pun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah indikator harapan hidup (indeks kesehatan).

Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat di alokasikan minimal 5% (lima persen) dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran

kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepelih persen) dari APBD di laur gaji.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang telah lebih dahulu dilaksanakan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian baru yang sedang dilaksanakan. Tujuan memasukkan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui kerangka teoritis dan ilmiah yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan dapat melengkapi dan memperkaya penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

**Tabel 2.**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	(Hidayat & Azhar, 2022)	Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.	Analisis Regresi Data Panel	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di indonesia, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di indonesia, dan pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur berpengaruh positif tidak signifikan

				terhadap kemiskinan di Indonesia.
2.	(Mardiana et al., 2018)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan serta Infrastruktur terhadap Tingkat Pengangguran serta Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.	Analisis Jalur Path Analisis	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengangguran terbuka berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur.
3.	(Riska Aini, 2020)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.	Analisis Regresi Data Panel	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dan

				pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan yang ada pada kabupaten/kota di Jawa Timur.
4.	(Hatta, 2018)	Peran Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Wilayah Ajatappareng	Analisis Regresi Data Panel	Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
5.	(KINANTI, 2018)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dan Pengeluaran di Bidang Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan	Analisis Data Regresi Linear Berganda dengan Data Panel	Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
6.	(Fitriani et al., 2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Pengeluaran Pemerintah	Analisis Regresi Linear Berganda	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pendapatan Asli Daerah dan



				Belanja Modal tidak signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah
7.	(Nasrullah et al., 2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Wajo	Analisis Regresi Linear Berganda	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah

### C. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka berfikir menggambarkan rancangan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini. (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang akan diteliti yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian dan setiap menyusun paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir di uraikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan Terhadap Tingkat kemiskinan

Pendidikan menjadi salah satu hal penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, yang nantinya akan mengurangi ketimpangan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan (penghasilan yang layak) untuk Negara yang berkembang (Todaro, 2006)

Pendidikan formal dan informal dapat memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dalam jangka Panjang, baik secara tidak langsung dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara umum, atau secara langsung dengan melatih kaum miskin dalam keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan dengan demikian pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

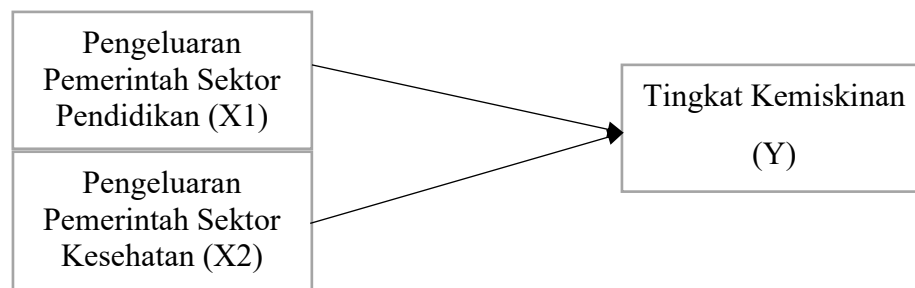
Menurut (Agus Salim, 2007), pengeluaran pemerintah disektor Pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan suatu kebijakan *pro poor* yang mempunyai dampak negatif terhadap kemiskinan melalui dampaknya terhadap pertumbuhan dan pemerataan. Disamping itu kebijakan pengeluaran tersebut mempunyai tersendiri terhadap pertumbuhan melalui dampaknya terhadap pembentukan modal manusia (*human capital*). Kebijakan inilah yang dianggap sebagai kebijakan yang berdampak ganda (*win win policies*).

## 2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pengeluaran Pemerintah untuk bidang kesehatan merupakan bagian uang dibutuhkan pada indeks kemiskinan. Kebijakan pemerintah menjamin hak warga negara untuk tetap sehat dengan cara memfasilitasi layanan kesehatan yang lengkap dan terjamin mutunya dengan biaya yang relatif murah agar bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat bahkan dari kalangan yang rendah.

Kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, memadai, terjangkau bagi semua kalangan, dan berkualitas dapat di berikan oleh pemerintah melalui anggaran belanja yang mengutamakan hak masyarakat banyak sehat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menggambarkan skema kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka konseptual**

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang kemungkinan benar atau salah. Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka akan dibuat hipotesis penelitian seperti berikut :

1. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
2. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.